

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pentingnya sebuah keputusan kebijakan yang inovatif merupakan suatu hal yang mendasar dalam pengambilan kebijakan. Karena hal ini dapat memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Yang dimaksud dengan keputusan disini ialah keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah terkait pengambilan keputusan kebijakan. Para pejabat pemerintah hendaknya dapat membuat keputusan kebijakan yang inovatif meskipun tanpa harus adanya tuntutan kebijakan yang inovatif dari masyarakat. Karena pemerintah yang inovatif akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kepuasan masyarakat, hal ini disebabkan pemerintah yang inovatif mampu memberikan hal yang baru baik dari metode ataupun penemuan kepada masyarakatnya sehingga hal itu dapat dikatakan sebuah inovasi dari pemerintah.

Pada bab ini akan di paparkan beberapa inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam mengelola sampah di Kota Batu. Inovasi tersebut yaitu TPA Tlekung di Desa Tlekung, Gerakan Kesadaran Terlibat Saber Pungli dan Bank Sampah Temas Bersinar di Kelurahan Temas. Adapun dalam upaya pengelolaan sampah di TPA Tlekung, inovasi pemerintah saat ini TPA Tlekung telah mampu memberikan manfaat kepada masyarakat hasil dari pengelolaan sampah di TPA berupa gas metan, pupuk cair organik serta pemberdayaan pemulung.

Pada permasalahan penelitian ini, peneliti akan menjabarkan beberapa batas pengertian yang relevan sebagai tumpuan dalam melakukan pembahasan lebih

lanjut. Adapun konsep yang disajikan pada bab ini yaitu menjabarkan beberapa konsep dan teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, maka yang akan dijelaskan sebagai tumpuan atau dasar dalam pembahasan adalah sebagai berikut :

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Hadirnya kebijakan publik ditengah kehidupan kita dengan cara bagaimana pemerintah mengambil tindakan pembuatan keputusan kebijakan publik sangat berdampak langsung pada kehidupan di dunia ini, baik kehidupan individu, kelompok maupun masyarakat. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa keluaran-keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah, yang harus kita bedakan dari apa yang ini dikerjakan oleh pemerintah. Di sini, perhatian kita arahkan pada hal-hal seperti jumlah pajak yang berhasil dihimpun, jumlah jalan tol yang berhasil dibangun, jumlah tenaga dokter dan tenaga medis yang telah ditempatkan oleh Kemenrtian Kesehatan di daerah-daerah pelosok, jumlah dana bantuan sosial yang telah dibayarkan, atau jumlah proyek bantuan luar negeri yang telah berhasil diselesaikan (Wahab, 2012 : 29).

Akan tetapi pada penelitian ini yang akan dilihat dari kinerja pemerintah adalah tentang kinerja pemerintah dalam mengatasi masalah sampah. Maka dari itu masyarakat Kota Batu mengharapkan adanya tindakan atau kebijakan yang mampu mengatasi masalah sampah di Kota Batu mengingat Kota Batu merupakan Kota Wisata, tentu sampah-sampah di Kota Batu akan di dominasi dari temoat-tempat wisata. Dengan demikian sangat dibutuhkan sebuah inovasi kebijakan dari

pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, terutama inovasi pengelolaan sampah yang kemudian bisa juga dijadikan sebagai wisata baru di Kota Batu.

Young dan Quinn menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan Publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu (Suharto, 2008 : 44). George C. Edwards III dan Ira Sharkansky mengartikan kebijakan publik sebagai apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi hal tersebut memiliki sasaran atau tujuan kepada program pemerintah. Kebijakan dasar itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dengan berbagai program dan tindakan yang dilakukan pemerintah (Setyawati, 2006 : 12).

2. Inovasi Kebijakan Publik

Secara konseptual, menurut Handbook Administrasi Negara (2014 : 18) dalam Ahmad Sururi (2016 : 6) mengungkapkan bahwa inovasi kebijakan publik terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu menjadi sebagai berikut :

- a. *Policy Innovation : new policy direction and initiatives*, yaitu inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini dapat diartikan bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pada prinsipnya harus dapat memuat sesuatu yang baru.
- b. *Innovation in the policy making process*, yaitu inovasi yang dapat memengaruhi proses pembuatan dan perumusan kebijakan. Sebagai contoh

adalah proses perumusan kebijakan yang selama ini belum dapat dikatakan telah memfasilitasi peran serta warga masyarakat atau stakeholder terkait.

- c. *Policy to foster innovation and its diffusion*, yaitu kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi berbagai sektor.

B. Innovative Governance

1. Pengertian *Innovative Governance*

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government*, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisiil atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja (Sadjijono, 2008 : 41).

Menurut Suhady, pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect*. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan

pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya (Riawan, 2009 : 197). Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah lembaga atau badan yang memiliki fungsi kekuasaan legislatif dan eksekutif untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan.

Inovatif berasal dari kata inovasi yang secara substantif, inovasi tersebut dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu inovasi berupa wawasan, konsep dan teori baru, inovasi berupa produk teknologi baru serta inovasi berupa struktur serta fungsi baru. Inovasi juga selalu berkaitan dengan konteks sosial tertentu dan dalam kurun waktu tertentu (Muhadjir, 1987 : 17). Istilah “penemuan” dapat diterjemahkan menjadi *discovery*, *invention*, ataupun, *innovation*. *Discovery* biasa diartikan sebagai penemuan sesuatu yang sudah ada, tetapi belum dikenal oleh satuan masyarakat tertentu. *Invention* biasa diartikan sebagai penemuan sesuatu yang sama sekali baru bagi warga masyarakat manapun. Sedangkan *Innovation* biasa digunakan untuk sebagai usaha menyelesaikan masalah.

Purwo Santoso (2016), Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada mendefinisikan pemerintahan inovatif adalah pemerintahan yang mengkondisikan, memfasilitasi dan meregulerkan praktek-praktek inovatif dalam pengelolaan kepentingan publik. Dalam sistem itu, ada elemen pemerintah dan ada juga elemen masyarakat/rakyat/warga negara. Lebih dari itu, sistem digerakan oleh interaksi antara keduanya. Dengan kata lain, inovasi ini mempertatuhkan kecerdasan atau kreatifitas, hanya saja kecerdasan dan kreatifitas ini adalah wataknya sistem pemerintahan, bukan sekedar wataknya pimpinan.

2. Indikator Innovative Governance

Selain itu hasil *benchmarking* teoritis dari *Global Innovation Index* dan *Government Innovation Index* di Korea Selatan (LAN, 2016 : 42) bahwa pemerintah bisa dikatakan inovatif merupakan pemerintah yang memiliki input 10 indikator pemerintah inovatif dan 20 indikator output. Adapun 10 indikator tersebut yaitu visi inovasi, komitmen perubahan, reward bagi inovator, kebijakan pendorong inovasi, kapasitas sumber daya manusia inovasi, kepedulian sumber daya manusia terhadap inovasi, pengembangan sumber daya inovasi, dukungan anggaran, optimalisasi CSR dalam mendukung inovasi, dan penggunaan IT (teknologi informasi) dalam sistem kerja.

Sedangkan 20 indikator dalam output pemerintahan inovatif yaitu terdiri dari jumlah inovasi yang dihasilkan, jenis inovasi yang dihasilkan, kualitas inovasi, pedoman teknis operasional inovasi pemda, pelebagaan inovasi, ketersediaan sistem informasi layanan publik, penyelesaian layanan pengaduan, tingkat capaian hasil survey kepuasan masyarakat (SKM), peningkatan jumlah perijinan, peningkatan pendapatan perkapita, peningkatan lapangan kerja, peningkatan investasi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan PAD, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tingkat partisipasi stakeholders, opini BPK terhadap laporan keuangan, nilai capaian LAKIP, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan peningkatan nilai IPM.

Indikator pemerintahan inovatif menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam *Innovative Governance Award* Tahun 2017 ada 5 indikator. Adapun 5 indikator tersebut adalah inovasi minimal telah berjalan 2 tahun, memiliki kebaharuan dan keunikan, melibatkan peran masyarakat serta

stakeholder, dibiayai APBD dan atau pembiayaan yang sah dan memberikan dampak atau manfaat bagi daerah dan masyarakat.

Sedangkan menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah indikator pemerintahan inovatif ada 8 yaitu, peningkatan efisiensi, perbaikan efektifitas, perbaikan kualitas layanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa indikator pemerintahan inovatif memiliki ciri-ciri yaitu bertujuan untuk kepentingan bersama atau masyarakat artinya tidak untuk kepentingan pihak tertentu, memiliki pembiayaan/anggaran yang jelas serta melibatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Sedangkan untuk indikator yang akan digunakan pada penelitian ini akan melihat dari indikator yang pertama adalah dampak inovasi bagi daerah dan masyarakat, kedua, pengembangan sumber daya inovasi, ketiga dukungan anggaran atau pembiayaan sah lainnya, keempat, berorientasi pada kepentingan umum serta kelima yaitu melibatkan peran serta masyarakat.

3. *Social Empowerment*

Menurut Sumodiningrat (2001), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka masing-masing. Selain itu Kartasasmita (1996), menyatakan bahwa memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat

lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau dengan kata lain memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat juga di tegaskan oleh Merriam (1985), yang mengemukakan bahwa pemberdayaan mengandung dua pengertian yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan dan memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Menurut Setiawan (2001) terdapat lima variabel dalam pemberdayaan masyarakat antara lain yaitu :

- 1) **Inisiatif**; *Siapa yang mempunyai prakarsa ?* Inisiatif pembangunan dapat keluar dari komunitas maupun dari luar komunitas. Idealnya inisiatif tersebut selalu keluar dari dalam komunitas. Meskipun demikian, inisiatif dapat datang dari luar komunitas, sejauh komunitas tersebut setuju.
- 2) **Tujuan**; *Bagaimana tujuan dirumuskan ?* Tujuan sebaiknya dirumuskan oleh komunitas itu sendiri dan benar-benar merupakan tujuan mereka.
- 3) **Sumberdaya**; *Lokal atau luar ?* Idealnya, pembangunan masyarakat yang benar akan memanfaatkan seoptimal mungkin sumberdaya lokal. Hal ini akan mengurangi ketergantungan komunitas terhadap pihak luar. Meskipun demikian, pada prakteknya hal ini tidak selalu mudah.

- 4) **Proses;** *Bagaimana kontrol komunitas ?* Diharapkan masyarakat mempunyai kontrol yang sepenuhnya mulai dari perumusan masalah, usulan kebijakan, implementasi serta evaluasi.
- 5) **Output;** *Untuk siapa ?* Diharapkan masyarakat akan mendapatkan output yang maksimal dari proses pembangunan tersebut.

Berdasarkan variabel – variabel tersebut, selanjutnya menurut Setiawan (2003) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kesuksesan dan kegagalan pembangunan masyarakat. Faktor tersebut dapat dikelompokkan dalam dua katagori yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam komunitas yang berpengaruh dalam program pembangunan masyarakat. Hal ini meliputi empat hal, yakni sejarah komunitas, berkaitan dengan struktur dan kapasitas organisasi, terkait dengan sumberdaya yang dimiliki komunitas, berkaitan dengan kepemimpinan dalam komunitas itu sendiri sedangkan Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar komunitas yang berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat. Hal ini meliputi dua aspek, yakni menyangkut sistem sosial politik makro dimana komunitas berada, berkaitan dengan ada atau tidaknya agen-agen perantara yang dapat menjadi penghubung antara komunitas dengan dunia.

C. Sustainable Development

1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Rowland B.F.Pasaribu pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk

mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi pelaksanaannya, diantaranya ada empat hal yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang yang diikuti pendekatan secara ideal. Pembangunan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan yaitu; keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan

Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya :

- 1) Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*
- 2) *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang,
- 3) Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi
- 4) Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*).

- 5) Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- 6) Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

2. Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan

Menurut Sugandi,dkk (2007) dalam M. Zaini dan Agus Tri Darwanto (2015:27) mengungkapkan bahwa model pembangunan berkelanjutan didasarkan atas tiga pilar utama yang ketiganya saling berkaitan, yaitu pertama, society, berkaitan peran masyarakat, responsibility (tanggung jawab), interaksi sosial, berperilaku masyarakat dan kondisi sosial masyarakat yang ada di suatu wilayah, kedua, environment, yaitu berkaitan dengan lingkungan alam, termasuk lingkungan fisik serta adanya seperangkat kelembagaan sebagai hasil buatan manusia dalam rangka pemanfaatannya, ketiga, economy, yaitu kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk dalam rangka memperoleh keuntungan. Ketiga pilar tersebut saling terkait, apabila ketiganya dalam generasi sekarang saling terkait dan saling mendukung, maka dari hasil generasi sekarang akan dapat dinikmati generasi selanjutnya.

Pembangunan berkelanjutan terdiri dari berbagai pilar utama seperti yang telah dijelaskan diatas, namun pada penelitian ini akan terfokus pada pilar pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah lingkungan yang ter- diri lingkungan alam, fisik,

dan adanya kesadaran dari lingkungan sosial masyarakat tertentu dalam sikap serta perilakunya dilandaskan pengetahuan maupun wawasan dengan upaya menciptakan kelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang di- pergunakan disini adalah merupakan terjemahan dari *sustainable development* yang sangat populer dipergunakan di negara-negara Barat (Zaini dan Darmawanto, 2015:26). Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

D. Manajemen Pengelolaan Sampah

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan berbagai usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen merupakan suatu proses, karena menunjukkan cara yang sistematis untuk melakukan sesuatu (Husnan, 1989 : 2). Pengelolaan sampah di Kota Batu dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. Wilayah pelayanan persampahan meliputi 3 kecamatan. Terdapat 2 (dua) lokasi TPA Kota Batu yaitu 1 unit di Nganglik (Tahun 2010 sudah ditutup) dan 1 unit di Tlekung. Saat ini yang dioperasikan adalah TPA Tlekung yang dioperasikan sejak Juni 2009. Dengan

dioperasionalkan sarana dan prasarana sanitary landfill pada TPA Tlekung, saat ini TPA Tlekung dapat menampung sampah 245 m³/hari.

1. Fungsi-Fungsi Manajemen

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Perencanaan juga merupakan fungsi seorang manajer atau leader yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah memilih yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. Pengarahan juga merupakan membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta

bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

d. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam rencana. Pengendalian juga merupakan pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.

2. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/ 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. TPA merupakan tempat sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul dari sumber, pengumpulan, pemindahan atau pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.

Selain itu besarnya potensi yang ditimbulkan terhadap lingkungan oleh TPA, maka pemilihan lokasi TPA harus dilakukan dengan seksama dan hati-hati. Hal ini ditunjukkan dengan sangat rincinya persyaratan lokasi TPA seperti dijelaskan pada SNI 19-3241-1994 dalam Yeggi Darnas (2016 : 82) mengungkapkan tentang

Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, dalam kriteria regional dijelaskan bahwa syarat lokasi pembuangan sampah yaitu sebagai berikut:

1. Bukan daerah rawan geologi (daerah patahan, daerah rawan longsor, rawan gempa dan sebagainya)
2. Bukan daerah rawan hidrogeologis yaitu daerah dengan kondisi kedalaman air tanah kurang dari 3 meter, jenis tanah mudah meresapkan air, dekat dengan sumber air (dalam hal tidak terpenuhi harus dilakukan masukan teknologi)
3. Bukan daerah rawan topografis (kemiringan lahan lebih dari 20%)
4. Bukan daerah rawan terhadap kegiatan penerbangan di Bandara (jarak minimal 1,5 – 3 km)
5. Bukan daerah atau kawasan yang dilindungi.

Sedangkan menurut lampiran Keputusan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 281 Tahun 1989 Tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Sampah mengungkapkan bahwa lokasi untuk TPA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak merupakan sumber bau, asap, debu, bising, lalat, binatang pengerat bagi pemukiman terdekat minimal 3 Km
2. Tidak merupakan pencemar bagi sumber air baku untuk minum dan jarak sedikitnya 200 meter dan perlu memperhatikan struktur geologi setempat
3. Tidak terletak pada daerah banjir
4. Tidak terletak pada lokasi yang permukaan airnya tinggi

5. Tidak merupakan sumber bau, kecelakaan serta memperhatikan aspek estetika
6. Jarak dari bandara tidak kurang dari 5 Km

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat lokasi untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) antara lain adalah sebagai berikut :

1. TPA harus jauh dari aktivitas bandara
2. TPA harus jauh dari pemukiman masyarakat
3. TPA harus jauh dari sumber air baku, mata air atau sumber air yang bersih yang dapat merusak air tersebut
4. TPA tidak terletak pada daerah rawan topografis, daerah rawan geologi, daerah hidrogeologis dan bukan kawasan yang dilindungi
5. TPA tidak merupakan sumber bau, asap, debu, bising dan laot
6. TPA tidak terletak pada daerah rawan banjir

3. Komunitas Gerakan Kesadaran Terlibat Saber Pungli

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui komunitas, ada banyak definisi yang menjelaskan tentang arti komunitas. Tetapi setidaknya definisi komunitas dapat didekati melalui; *pertama*, terbentuk dari sekelompok orang; *kedua*, saling berinteraksi secara sosial diantara anggota kelompok itu; *ketiga*, berdasarkan adanya kesamaan kebutuhan atau tujuan dalam diri mereka atau diantara anggota kelompok yang lain; *keempat*, adanya wilayah-wilayah individu yang terbuka untuk anggota kelompok yang lain, misalnya waktu (Nasrullah, 2012 : 138). Komunitas juga dapat didefinisikan sebagai kelompok khusus dari orang-orang yang tinggal dalam wilayah tertentu, memiliki kebudayaan dan gaya hidup

yang sama, sadar sebagai satu kesatuan, dan dapat bertindak secara kolektif dalam usaha mereka dalam mencapai tujuan (Cohen, 1992 : 315). Jadi dapat disimpulkan bahwa komunitas adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan bersama.

Sebagai sebuah Komunitas peduli sampah dan lingkungan Komunitas Gerakan ini menggunakan tagline “ Kesadaran Terlibat”. Artinya, Sasaran gerakan ini adalah menggugah kesadaran setiap orang/kelompok untuk ikut mengambil bagian dalam upaya menjaga/melestarikan sungai dan sumber air. Tiap orang dapat menjadi bagian dan berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Sebuah *WhatsApp* Grup (WAG) “Kesadaran Terlibat” dibuat untuk saling bertukar informasi, memperkuat satu sama lain dalam gerakan ini. Sabers Pungli bukanlah sebuah organisasi dan tidak akan dibentuk sebagai organisasi, serta tidak memiliki struktur kepengurusan. Ada sekretariat tempat berkoordinasi. Segala hal teknis, keputusan dan lain-lain dilakukan bersama dalam satu diskusi yang dilakukan oleh penggerak, yang disebut Tim Sabers Pungli.

4. Bank Sampah

Menurut Wintoko, Bank adalah sebuah instalansi yang bergerak dibidang penyimpanan, terutama yang berhubungan dengan uang. Namun, belakangan ternyata Bank yang biasanya berhubungan dengan uang itu sudah berubah bentuk menjadi hal lain, salah satunya berhubungan dengan sampah yang dinamakan Bank Sampah. Bank Sampah adalah sebuah yayasan yang awalnya dibina di daerah Yogyakarta, dan kini sudah diadopsi di kota-kota seluruh Indonesia. Kinerja Bank

Sampah tersebut berlokasi di daerah Bantul, tepatnya di dusun Bandegan, Kelurahan Bantul Yogyakarta. (Wintoko, 2017 : 58).

Bambang mendefinisikan Bank Sampah adalah suatu tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah. Ruangan bank sampah dibagi dalam tiga ruang/locker tempat menyimpan sampah yang ditabung, sebelum diambil oleh pengepul/pihak ketiga (Suwerda, 2012 : 22). Selanjutnya Bambang juga menjelaskan bahwa yang dimaksud Penabung dalam hal ini adalah seluruh warga baik secara individual maupun kelompok, menjadi anggota penabung sampah yang dibuktikan dengan adanya kepemilikan nomor rekening, dan buku tabungan sampah, serta berhak atas hasil tabungan sampahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Teller adalah petugas bank sampah yang bertugas melayani penabung sampah antara lain, menimbang berat sampah, melabeli sampah, mencatat dalam buku induk, dan berkomunikasi dengan pengepul. Kemudian yang dimaksud dengan pengepul adalah perseorangan dan atau lembaga yang masuk dalam sistem pengelolaan sampah dengan tabungan sampah dan menilai secara ekonomi setiap sampah yang ditabung oleh warga baik individual maupun komunal. Pengelolaan sampah dengan system tabungan sampah di bank sampah, menekankan pertimbangan warga memilah sampah seperti yang dikembangkan dalam pengelolaan sampah dengan sistem mandiri dan produktif.